

PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUKOHARJO SEDOT ANGGARAN HAMPIR Rp200 MILIAR



Sumber Gambar:

https://pbs.twimg.com/media/GqavgAPWQAAMt_v?format=jpg&name=small

Isi Berita:

Esposin, SUKOHARJO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengalokasikan anggaran senilai Rp199 miliar untuk menggulirkan beragam program pengentasan kemiskinan. Program tersebut dijalankan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), swasta, lembaga pemerintah nonstruktural, dan masyarakat.

Pemkab Sukoharjo berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kamis (8/5/2025). Acara itu dihadiri oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Nunung Nuryantono. Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan tenaga kesejahteraan sosial.

Dalam kesempatan itu, Etik mengungkapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Sukoharjo secara konsisten melakukan intervensi khusus terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan. “Percepatan penanganan kemiskinan dilakukan dengan menjalankan program-program kegiatan yang melibatkan lintas sektoral. Ini sudah dijalankan di Sukoharjo,” kata dia.

Etik lantas memaparkan capaian dan beragam program pengentasan kemiskinan yang digeber Pemkab Sukoharjo selama beberapa tahun terakhir. Hasilnya, angka kemiskinan di Sukoharjo mengalami penurunan sejak masa pandemi Covid-19. Pada 2021, angka

kemiskinan di Sukoharjo sekitar 8,23 persen. Setahun kemudian, angka kemiskinan turun menjadi 7,61 persen pada 2022.

Pada 2023, tren penurunan angka kemiskinan berlanjut dengan persentase sekitar 7,58 persen. “Angka kemiskinan di Sukoharjo pada 2024 kembali turun menjadi 7,47 persen. Kami menargetkan angka kemiskinan kembali turun pada tahun ini. Tentunya, dengan kerja keras dalam menjalankan program-program kegiatan yang melibatkan lintas sektoral,” ujar dia.

Program-program tersebut seperti santunan kematian, bantuan pangan, hingga pemberian subsidi bunga pelaku UMKM dilakukan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jamu. Total alokasi anggaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan senilai kurang lebih Rp199 miliar.

“Termasuk rehab rumah tidak layak huni [RTLH] yang dibantu Baznas Sukoharjo. Pemkab Sukoharjo terus berupaya mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin,” ujar dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Nunung Nuryantono mengapresiasi capaian penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo. Nunung mendorong penguatan sinergitas program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat, Pemprov Jateng, dan Pemkab Sukoharjo.

Ada tiga fokus utama dalam penanganan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil masyarakat miskin.

“Sekarang arah kebijakannya cenderung meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Bagi penerima bantuan sosial [bansos] yang masih produktif didorong untuk bekerja sehingga mendapatkan penghasilan. Dengan begitu maka terjadi kemandirian sehingga masyarakat miskin naik status ekonominya,” ujar dia. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pengentasan-kemiskinan-di-sukoharjo-sedot-anggaran-hampir-rp200-miliar-2092911>, “Pengentasan Kemiskinan di Sukoharjo Sedot Anggaran Hampir Rp200 Miliar”, tanggal 8 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/pengentasan-kemiskinan-di-sukoharjo-sedot-anggaran-hampir-rp200-miliar/1124204066409251/>, “Pengentasan Kemiskinan di Sukoharjo Sedot Anggaran Hampir Rp200 Miliar”, 8 Mei 2025.

3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1920415260223131814>, “Pengentasan Kemiskinan di Sukoharjo Sedot Anggaran Hampir Rp200 Miliar”, 8 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengalokasikan anggaran senilai Rp199 miliar untuk menggulirkan beragam program pengentasan kemiskinan. Program tersebut dijalankan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), swasta, lembaga pemerintah nonstruktural, dan masyarakat.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi